

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Setiap negara harus memberlakukan prinsip tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), salah satunya termasuk negara Indonesia. Pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang berhasil menjalankan tugas sebaik-baiknya serta membangun negara atau daerahnya sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Untuk mencapai tujuan tersebut setiap pemerintahan harus dapat mengelola sumber daya yang ada di negara atau daerah, salah satunya yang terpenting adalah keuangannya (Kusuma, 2008).

Dalam mengelola keuangan negara maupun daerah dibutuhkan adanya transparansi dan akuntabilitas. Salah satu bentuk nyata pemerintah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara maupun daerah adalah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP). Hal ini diperkuat dengan ditetapkannya paket Undang-Undang bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Peraturan Perundang-undangan tersebut menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan

rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan (Kholis, 2013).

Laporan keuangan merupakan laporan yang disusun secara sistematis mengenai posisi keuangan suatu entitas pada saat tertentu, dan kinerja suatu entitas pada saat periode tertentu. Laporan keuangan juga merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia atau aparatur yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan SDM atau aparatur yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan (Roviyantie, 2011).

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam kompetensi aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan adalah pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan diarahkan pada peningkatan kompetensi yang dibutuhkan. Terbatasnya aparatur yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi menjadikan kurangnya pemahaman/penguasaan aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar.

Hariadi, dkk (2010: 125) menjelaskan kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang diwujudkan dalam bentuk informasi

akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Selain itu kualitas dari laporan keuangan harus memiliki empat karakteristik diantaranya harus relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Pemerintah daerah yang menangani masalah keuangan daerah tidak cukup hanya menguasai penatausahaan anggaran melainkan juga harus memahami karakteristik transaksi yang terjadi dan pengaruhnya terhadap rekening-rekening dalam laporan keuangan pemerintah daerah sehingga laporan keuangan daerah disajikan dengan tepat waktu dan berkualitas. Kegagalan SDM atau aparatur pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Terkait dengan masalah kompetensi, aparatur pemerintah Kabupaten Bone Bolango khususnya DPPKAD Kabupaten Bone Bolango memiliki kelemahan sistem pengendalian akuntansi mengenai pencatatan dan pelaporan akuntansi. Pada pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam pencatatannya belum sepenuhnya menerapkan pencatatan berbasis akrual atau yang dikenal dengan metode pencatatan *Double entry* berbasis akrual. Karena, untuk menerapkan metode pencatatan *double entry* berbasis akrual diperlukan sumber daya manusia (SDM) atau aparatur yang kompeten dalam memahami logika akuntansi secara baik. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Bone Bolango memiliki keterbatasan jumlah SDM atau aparatur yang kompeten dalam menguasai logika

akuntansi secara baik dikarenakan terbatasnya aparatur yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi. Dengan minimnya pengetahuan aparatur dalam menguasai dan memahami logika akuntansi secara baik maka berdampak pada penyajian laporan keuangan Kabupaten Bone Bolango, terkait dengan penyajian aset.

Menurut BPK RI terkait dengan penyajian aset tetap per 31 Desember 2012 dan 2011, terdapat aset tetap yang belum dapat diketahui kewajarannya sebesar Rp. 96.677.501.720,30 yang terdiri dari: Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang tidak dapat diketahui keberadaannya sebesar Rp16.002.569.966,30; biaya perencanaan, pengawasan dan rehabilitasi yang belum dikapitalisasi ke aset terkait pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp11.252.037.626,00 dan pada Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp64.151.950.964,00; biaya ganti rugi tanaman dan bangunan sebesar Rp1.952.893.699,00 belum dikapitalisasi ke Aset Tanah terkait; dan Aset tetap lainnya berupa hewan ternak dan buku-buku sebesar Rp3.318.049.465,00 tidak dapat diketahui keberadaannya serta tidak dapat dirinci item jenis asetnya. Dan juga, catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas nilai aset tetap periode bersangkutan. Sehingga laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bone Bolango masih mendapatkan opini "Wajar Dengan Pengecualian" atau *Qualified Opinion* dari BPK RI Perwakilan Gorontalo.

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Thalib (2012) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo.

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Kholis (2013) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Pegawai dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Medan”. Hasil penelitiannya menunjukkan secara simultan kompetensi pegawai dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pemerintah Kota Medan.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut tentang “Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango pada DPPKAD Kabupaten Bone Bolango”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango memiliki keterbatasan jumlah aparatur yang kompeten dalam menguasai logika akuntansi secara

baik terkait penerapan pencatatan berbasis akrual dikarenakan terbatasnya aparatur yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi.

2. Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango masih mendapatkan opini WDP “Wajar Dengan Pengecualian” dari BPK RI Perwakilan Gorontalo terkait dengan penyajian aset tetap per 31 Desember 2012 dan 2011, terdapat aset tetap yang belum dapat diketahui kewajarannya sebesar Rp. 96.677.501.720,30 yang terdiri dari: Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang tidak dapat diketahui keberadaannya sebesar Rp. 16.002.569.966,30; biaya perencanaan, pengawasan dan rehabilitasi yang belum dikapitalisasi ke aset terkait pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 11.252.037.626,00 dan pada Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 64.151.950.964,00; biaya ganti rugi tanaman dan bangunan sebesar Rp. 1.952.893.699,00 belum dikapitalisasi ke Aset Tanah terkait; dan Aset tetap lainnya berupa hewan ternak dan buku-buku sebesar Rp. 3.318.049.465,00 tidak dapat diketahui keberadaannya serta tidak dapat dirinci item jenis asetnya. Dan juga, catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas nilai aset tetap periode bersangkutan. .

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah kompetensi aparatur berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi untuk diperbandingkan dengan penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah khususnya di Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bone Bolango dalam meningkatkan kompetensi aparatur untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas.